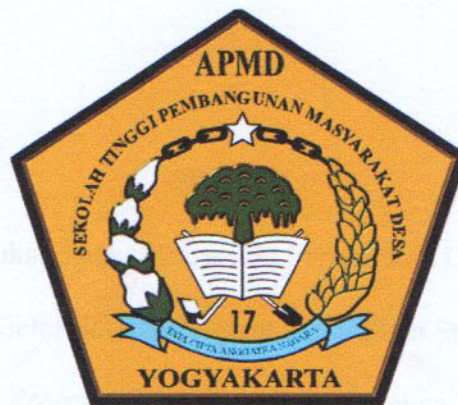


SKRIPSI

**RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN COVID-19 DI KALURAHAN GARI,
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

NATALIA CICI PRATIWI

NIM: 18520110

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



HALAMAN JUDUL

**RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KALURAHAN GARI,
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN


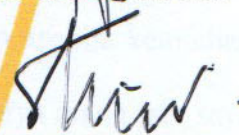
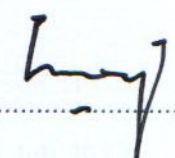
Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Juli 2022

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u> Penguji samping I	
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Cuno Tri Tjahjoko, M.A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natalia Cici Pratiwi

NIM : 18520110

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Natalia Cici Pratiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta berkat dan kasih setia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.IP pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Analius Giawa S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing, sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat-nasehat yang sangat mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
5. Seluruh perangkat Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
6. Bapak Rudi Masla dan Ibu Adria Erna Kartika selaku orang tua terkasih yang selalu mendukung, menopang dan terus mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
7. Pihak lainnya, sahabat, dan teman-teman seperantauan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dibutuhkan segala kritik dan saran yang proporsional dan bertanggung jawab demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, organisasi, dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Penulis

Natalia Cici Pratiwi

MOTTO

“Pada waktu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(Korintus 10:13)

“Jika kita memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai impian dan cita-cita walaupun dirasa sangat sulit itu tidak masalah selama masih ada niat dan keyakinan untuk mewujudkannya. Kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang diusahakan akan tercapai”

(John Rohn)

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”

(Nelson Mandela)

“Jangan menyerah, jangan lengah dan jangan merasa lelah karna kuasa doa dan perjuangan sugguu tak ada batasnya. Suatu saat rasa lelah dan rasa kecewa berganti dengan bahagia bahkan ada rasa syukur tak terhingga”

(Natalia Cici Pratiwi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta berkat dan kasih setia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Dengan segala ucapan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang hingga pada saat ini selalu menuntun, menganugraahkan berkat-Nya memberikan keindahan pada sebuah karya yang telah saya buat, sebuah perjalanan panjang untuk menempuh pendidikan dari nol hingga sampai saat ini dari Tuhan selalu menjadi terang Roh Kudus.
2. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Rudi Masla dan Ibu Adria Erna Kartika orang tua yang selalu ada. Trimakasih buat semua yang sudah bapak ibu berikan kesabaran, dukungan, doa, nasehat, biaya pendidikan serta tawa kasih sayang dikeluarga kita sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini. Didikanmu dari kecil yang mengajarkan saya kalau hidup perlu perjuangan, penuh tantangan semua yang kalian berikan semoga ini bisa menjadi senyuman yang tak terlupakan bagi Bapak dan Ibu.
3. Terima kasih juga saudaraku Carolina Alena, Avingka Oktaviani, dan Richard Ronal Masla atas doa, dukungan dan dorongan disaat saya sulit kalian selalu ada sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan lebih bermakna.
4. Terima kasih juga buat Mas Tio yang selalu mendengarkan keluh kesah saya menyemangati, mendukung, nasehat, doa dan dorongan sehingga studi saya ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Terima kasih juga kakek nenek keluarga besar yang ada di kampung halaman yang sudah banyak membantu, mendoakan, mendorong, mendukung, menasehatin saya hingga saya bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini banyak membantu saya, mendukung memberikan canda tawa terutama kepada Hery, Muis, Langga, Lula, Intan, Yuli, Bowo, Hila, Angel, Listin, Pion, Kak Lisa, Inel dan kawan-kawan seperantauan.
7. Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing saya bapak Analius Giawa, S.IP, M.Si yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada para dosen STPMD “APMD” yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh studi di kampus tercinta STPMD “APMD” yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.
9. Terima kasih juga untuk teman-teman UKM SETATER yang sudah menjadi rumah kedua di Jogja dan tempat ternyaman untuk berorganisasi, berkreasi, bercerita, dan melakukan banyak hal.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. <i>Literature Review</i>	11
F. Kerangka Konseptual.....	15
1. Relasi Kuasa.....	15
2. Pemerintah Desa.....	18
3. Kebijakan	20

4. Pencegahan Covid-19.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Unit Analisis	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	28
BAB II PROFIL KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	31
A. Kondisi Geografis	31
1. Luas Wilayah	31
2. Letak Wilayah	32
B. Kondisi Demografi.....	33
1. Data Penduduk Menurut Usia atau Umur	33
2. Lembaga Pemerintah.....	35
3. Tingkat Pendidikan	43
4. Lembaga Kemasyarakatan	44
5. Satgas Covid-19 di Kalurahan Gari	45
BAB III RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KALURAHAN GARI.....	49
A. Otoritas Pemerintah Kalurahan di Masa Pandemi dalam Penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari.....	52
B. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Gari dalam Penanganan Covid-19.	59

C. Kepatuhan Masyarakat oleh Faktor Rasional- Legal di Kalurahan Gari dalam Penanganan Covid-19.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91
A. Pedoman Wawancara	91
B. Dokumentasi	93

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Deskripsi Narasumber (<i>Informan</i>)	26
Tabel II.1	Luas Wilayah Kalurahan Gari.....	31
Tabel II.2	Penduduk Menurut Usia.....	34
Tabel II.3	Prasarana Kesehatan.....	40
Tabel II.4	Sarana Kesehatan	41
Tabel II.5	Kelengkapan Lembaga Keamanan.....	42
Tabel II.6	Data Penduduk Menurut Pendidikan	43

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Gari.....	35
Bagan II.2 Struktur BPD atau BPKal Kalurahan Gari.....	37
Bagan II.3 Struktur Satgas PPKM Gari Nyawiji M01 Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Rapat Pra Kondisi Pembentukan Tim Satgas Covid-19.....	47
Gambar III.1 Peta Gunungkidul Jadi Zona Merah Corona di DIY	49
Gambar III.2 Himbauan Pencegahan Covid-19 di Kalurahan Gari	50
Gambar III.3 Penyaluran BLT kepada warga yang terdampak Covid-19	55
Gambar III.4 Penjemputan Warga Kalurahan Gari yang terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Kapanewon Wonosari.....	61
Gambar III.5 Diskusi dalam Rangka Penanganan Pembatasan Hajatan di Kalurahan Gari.....	63
Gambar III.6 Kearifan Lokal <i>Lockdown</i> Covid-19 di Kalurahan Gari	65
Gambar III.7 Pemantauan dari Tim Satgas kepada Masyarakat yang <i>Suspect</i> Covid-19.....	67
Gambar III.8 Himbauan Pencegahan Covid-19 di Kalurahan Gari	72
Gambar III.9 Himbauan Pencegahan Covid-19 di Kalurahan Gari	75
Gambar III.10 Himbauan dari Panewu Wonosari di Kalurahan Gari.....	80
Gambar III.11 Sosialisasi Penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari.....	82

INTISARI

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama kurang lebih dua tahun (2020-2022) terakhir memberikan dampak yang signifikan di setiap sektor kehidupan masyarakat. Sektor-sektor tersebut antara lain kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, dan sebagainya. Terhadap hal ini, Pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk bersinergi dengan berbagai *stakeholders* untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan dampak wabah Covid-19. Dalam perang melawan pandemi Covid-19, pemerintah kalurahan dan masyarakat dituntut untuk bersinergi dan membangun relasi yang baik sehingga mampu membawa kalurahan keluar dari krisis global ini. Masalah penelitian ini adalah bagaimana relasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Pamong Kalurahan, dan Tim Relawan Covid-19, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kalurahan Gari. Dalam menganalisis data dilakukan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan klarifikasi data untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, otoritas merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Kalurahan Gari untuk dapat melegitimasi segala kebijakan yang akan mereka keluarkan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, otoritas yang melekat pada institusi Pemerintah Kalurahan Gari masih lemah. Pemerintah Kalurahan Gari belum menggunakan otoritasnya dengan maksimal karena tidak mampu mewujudkan kepatuhan bagi masyarakat. Ketidapatuhan masyarakat dapat dilihat dari adanya pasien Covid-19 yang pada akhirnya meninggal dunia. *Kedua*, dalam membuat kebijakan pemerintah Kalurahan Gari bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai elemen. Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kalurahan Gari mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan mengurangi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi penetapan anggaran penanganan Covid-19, *lockdown* wilayah, pembuatan posko, pembentukan Satgas Covid-19, pembentukan relawan PPKM, penyaluran BLT DD, sembako, dan vitamin kepada masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid-19. *Ketiga*, kepatuhan masyarakat tercipta karna faktor eksternal dan internal. Namun, sejauh ini masyarakat Kalurahan Gari belum terlalu patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang penanganan dan pencegahan Covid-19. Ketidapatuhan itu membawa konsekuensi yaitu adanya pasien Covid-19 yang pada akhirnya meninggal dunia.

Kata Kunci: Relasi, Pemerintah Desa, Kebijakan, Penanganan Covid-19.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that has hit the world for approximately the last two years (2020-2022) has had a significant impact on every sector of people's lives. These sectors include health, economy, politics, social, culture, religion, security, and so on. In this regard, the Government of Gari Village, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region seeks to synergize with various stakeholders to prevent and minimize the spread and impact of the Covid-19 outbreak. In the fight against the Covid-19 pandemic, the village government and the community are required to synergize and build good relations so that they are able to bring the village out of this global crisis. The problem of this research is how is the relationship between the village government and the community in handling Covid-19 in the Gari Village, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region?

The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the writer uses observation, interview, and documentation techniques. The informants or informants in this study were the Village Head, Pamong Kalurahan, and the Covid-19 Volunteer Team, Community Leaders and the Gari Village Community. In analyzing the data, several stages were carried out, namely data collection, data reduction, data presentation and data clarification for drawing conclusions.

The results of the study show that: First, authority is important for the Gari District Government to be able to legitimize all the policies they will issue. However, in practice, the authority attached to the Gari Village Government institution is still weak. The Gari District Government has not used its authority to the fullest because it is unable to achieve compliance for the community. Community disobedience can be seen from the presence of Covid-19 patients who eventually died. Second, in making government policies, the Gari District cooperates and coordinates with various elements. During the Covid-19 pandemic, the Gari Village Government issued several policies aimed at overcoming the spread of Covid-19 and reducing the impact that Covid-19 had on people's lives. These policies include setting a budget for handling Covid-19, regional lockdowns, establishing command posts, establishing a Covid-19 Task Force, forming PPKM volunteers, distributing BLT DD, basic necessities, and vitamins to people affected and exposed to Covid-19. Third, community compliance is created due to external and internal factors. However, so far the people of Kalurahan Gari have not been too obedient to the regulations issued by the government regarding the handling and prevention of Covid-19. This non-compliance has consequences, namely the presence of Covid-19 patients who eventually died.

Keywords: Relations, Village Government, Policy, Handling Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama kurang lebih dua tahun (2020-2022) terakhir memberikan dampak yang sangat signifikan di setiap sektor kehidupan masyarakat. Sektor-sektor tersebut antara lain kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, dan sebagainya. Terhadap hal ini, Pemerintah Indonesia berupaya untuk bersinergi dengan berbagai *stakeholders* untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan dampak wabah Covid-19. Dalam kerangka itu, Pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerumunan. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Indonesia hendak menghimbau masyarakat agar melakukan aktivitas dari rumah atau yang lazim disebut dengan istilah *work from home*. Kebijakan PPKM ini dilakukan secara serempak di semua wilayah di Indonesia untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Pemberlakuan PPKM pada gilirannya membawa dampak yang berbeda bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki penghasilan tetap tentu tidak khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*necessity*). Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap tentu sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak mengherankan kebijakan PPKM kerap menimbulkan penolakan dari masyarakat kalangan bawah.

Kompas.com (23/04/2020) melansir Survei Jurnalisme Presisi tentang PPKM dan Mudik Lebaran yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI dan Indo Barometer. Survei tersebut menunjukkan bahwa 40,3% responden menolak kebijakan PPKM karena kesulitan mencari nafkah. Jumlah tersebut merupakan rincian dari 10% responden yang menilai bahwa penerapan PPKM tidak tepat. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 30,7% responden menilai bahwa PPKM berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sementara, sekitar 8,5% responden menolak PPKM karena menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan.

Pada 4 Juli 2020, puluhan mahasiswa dan pedagang melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Ambon guna menolak perpanjangan PPKM karena dianggap menyusahkan rakyat kecil. Aksi ini merupakan bentuk kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang kurang merasakan penderitaan masyarakat kecil. Di Ambon, penolakan terhadap kebijakan perpanjangan PPKM tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa dan pedagang, tetapi juga dilakukan oleh Panitia Khusus Covid-19 DPRD Kota Ambon. Panitia Khusus DPRD menilai bahwa penetapan PPKM sangat berdampak

pada sektor ekonomi. PPKM membuat perputaran ekonomi menjadi berhenti karena adanya pembatasan pada usaha-usaha masyarakat. Dengan demikian, PPKM sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon yang mana mengalami penurunan secara signifikan (Siwalima News.com, 04/07/2020).

Kebijakan PPKM sebetulnya cukup dilematis. Di satu sisi, kebijakan tersebut berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di sisi lain, kebijakan tersebut menghambat perputaran ekonomi masyarakat. Himbauan bekerja dari rumah (*work from home*) tidak mampu memberi jaminan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, alih-alih patuh terhadap kebijakan tersebut, masyarakat justru merasa jenuh dengan kebijakan tersebut. Masyarakat menghadapi persoalan yang cukup berat mulai dari kesulitan mencari nafkah hingga kehilangan mata pencaharian.

Pemerintah menuntut masyarakat agar patuh terhadap kebijakan PPKM. Masyarakat mencoba patuh terhadap kebijakan tersebut tetapi dengan segera menyadari bahwa kebijakan pendukung yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup memadai untuk menjangkau masyarakat kelas bawah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat kekeliruan yang fundamental dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kebijakan bersifat perencanaan *top down*. Dengan begitu, kebijakan tersebut berbasis pada preferensi pemerintah dan tidak berbasis pada aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ada semacam miskomunikasi dan miskoordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam

mengimplementasikan kebijakan PPKM tersebut. Konsekuensi logisnya adalah masyarakat tidak percaya (*distrust*) pada pemerintah.

Sama seperti wilayah lain, sejak kemunculan pandemi Covid-19, Kalurahan Gari juga terus menerus mempraktikkan kebijakan PPKM. Kebijakan ini dilaksanakan dalam berbagai tindakan pencegahan Covid-19 seperti penutupan jalan dan penjagaan di setiap posko keluar masuk kampung. Tindakan ini juga ditopang oleh peraturan lain seperti menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan, serta aturan lain sesuai dengan himbauan yang telah disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO). Berbagai tindakan ini telah diusahakan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kalurahan Gari untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Dalam perang melawan pandemi Covid-19, pemerintah desa dan masyarakat dituntut untuk bersinergi dan membangun relasi yang baik sehingga mampu membawa desa keluar dari krisis global ini. Dalam kerangka itu, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan kekuasaannya dalam mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat terutama untuk membawa desa keluar dari krisis global ini. Upaya pemerintah desa bisa berwujud kebijakan, program, maupun strategi yang bertujuan untuk membebaskan desa dari pandemi Covid-19.

Sementara itu, upaya pemerintah desa mustahil bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya respon dari masyarakat desa. Masyarakat desa perlu mempercayai pemerintah desa dan menggalang aksi kolektif (swadaya, gotong

royong, dan lain-lain) sehingga desa mampu keluar dari krisis global ini. Dengan demikian, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa mesti diinformasikan kepada masyarakat desa. Singkatnya, sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik jika terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah desa, selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku penerima kebijakan.

Kemunculan pandemi Covid-19 tentu saja membawa dampak yang luar biasa pada berbagai sektor termasuk relasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Dengan demikian, pemerintah desa bersama perangkat lainnya termasuk masyarakat harus bisa bekerjasama dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Solusi atas penanganan Covid-19 tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin. Pada saat seperti ini, hubungan atau relasi pemerintah desa dengan masyarakat tentunya menjadi hal sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19. Mengingat pemerintah pusat sudah banyak mengeluarkan dana dalam upaya pencegahan Covid-19, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan hingga tingkat Desa.

Salah satu kebijakan yang dibuat pada masa pandemi Covid-19 adalah Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Kebijakan tersebut berisi tentang pembentukan tim relawan desa untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Tim relawan desa inilah yang akan bergerak di seluruh wilayah desa untuk mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19. Kerja pemerintah desa (Pemdes) pun tetap terpadu dan

efektif serta efisien. Pemdes menjadikan tim relawan desa ini sebagai mitra dalam pencegahan dan penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pemerintah desa dan perangkatnya melalui tim relawan desa kemudian mengeksekusi kebijakan pada tataran warga. Selain itu, anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Desa Sehat, serta pendamping lainnya yang berdomisili di desa seperti Bidan Desa, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD), dan Pendamping Desa ikut terlibat aktif sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dengan keadaan yang semakin buruk yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi, tentunya pemerintah desa membutuhkan suatu regulasi yang tepat guna menolong warganya yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, kebijakan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa merupakan kabar baik bagi para pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan harapan dapat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan warga desa.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menggunakan Dana Desa untuk menolong masyarakat dan membuat kebijakan berskala desa yang sesuai dengan kondisi desanya. Melalui surat edaran ini, desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan

Penanganan Covid-19. Bagaimanapun kebijakan tersebut membutuhkan respon pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa, ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, otoritas Pemerintah Kabupaten Gari harus mampu melihat isu-isu strategis yang dibutuhkan pada masa sekarang, terutama dalam pencegahan Covid-19.

Pemerintah kabupaten merupakan aktor sekaligus institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas kepentingan masyarakat kabupaten. Menurut Weber (dalam Hotman Sihan, 1986: 21), wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Menurut Weber kekuasaan itu bersifat mengikat yang disebabkan oleh pihak penguasa memiliki sumber dalam memperoleh kekuasaan dan kekuasaan tersebut bisa bersifat memaksa. Weber menekankan tentang relasi kekuasaan yang berbicara antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Namun,

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan sebagai instrumen yang mengatur seluruh kegiatan masyarakat belum mampu mengintegrasikan penertiban dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dalam perang menghadapi pandemi Covid-19, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba menerapkan berbagai strategi dan kebijakan. Dalam penanganan Covid-19, peran aktif pemerintah kalurahan ditunjukkan dengan berbagai cara mulai dari penganggaran Dana Desa untuk membantu masyarakat terkena dampak, membuat pos penjagaan orang keluar masuk desa, vaksinasi, membeli peralatan seperti pengukur suhu, desinfektan, peralatan cuci tangan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Namun, makin hari, masyarakat merasa bahwa peran pemerintah kalurahan semakin kurang efektif, tidak seperti pada awal kemunculan pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa ada warga yang meninggal karena Covid-19. Kemudian, penyebaran Covid-19 juga berlangsung cepat karena keluarga almarhum melakukan interaksi langsung dengan alasan ingin mengantar almarhum terakhir kalinya ke tempat peristirahatan, jadwal jaga yang kurang efisien, masih ada warga yang tidak mematuhi memakai masker, dan alat pengukur suhu yang terbatas.

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, relasi pemerintah kalurahan dengan masyarakat sangatlah penting. Artinya, penanganan Covid-19 tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak saja, yaitu pemerintah kalurahan. Tapi, semua harus diselesaikan secara bersama. Masyarakat dan

pemerintah desa harus ikut andil dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah kalurahan harus bisa mengutamakan bidang kesehatan serta menentukan strategi apa saja yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan Covid-19. Berbagai upaya ini tentunya harus didukung penuh oleh elemen masyarakat yang ada. Artinya, antara pemerintah kalurahan dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Namun, fenomena di Kalurahan Gari menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 belum berjalan dengan efisien. Walaupun sudah berupaya untuk menanggulangi Covid-19, Pemerintah Kalurahan Gari belum bisa mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini terjadi karena masyarakat belum patuh pada kebijakan yang ada. Pada tahun 2020, Kalurahan Gari termasuk dalam wilayah zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya korban Covid-19 yang meninggal dunia. Fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah relasi pemerintahan dan masyarakat dalam implementasikan kebijakan penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Pemerintah Kalurahan Gari dalam penanganan Covid-19;
2. Kebijakan Kalurahan Gari dalam penanganan Covid-19; dan
3. Kepatuhan masyarakat Kalurahan Gari dalam penanganan Covid-19 oleh faktor kuasa rasional-legal.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah “Bagaimana relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19, di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali relasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan, serta literatur penelitian yang sejenis

mengenai relasi pemerintah dan masyarakat dalam implementasikan kebijakan penanganan Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang relasi antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan dalam penanganan Covid-19.
- b. Bagi Pemerintah Kalurahan Gari, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan Gari agar membentuk relasi kemitraan dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19.

E. Literature Review

Pada dasarnya, penelitian tentang relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Dahlan yang berjudul “Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao”. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan itikad baik tersebut karena bisa menunggu waktu panen untuk membayar pajak sedangkan pemerintah akan berkesempatan untuk memperoleh nama baik dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam

melunasi pajak. Selanjutnya, implikasi proses pemungutan pajak di Desa Tabbinjai ada dua yakni dari segi pembangunan sendiri ada beberapa sektor yang sudah dirasakan masyarakat seperti infrastruktur jalan dan transportasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dona Fauziah yang berjudul “Relasi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk antara pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015 adalah relasi dominatif. Hal ini terjadi karena penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial atas aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Di sisi lain, penguasa dan pengusaha meminggirkan masyarakat dalam skema penambangan ini. Akibatnya, PETI sangat merusak lingkungan, tatanan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.
3. Ravi Santoso dalam penelitiannya yang berjudul “Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”,

mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa serta tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan dikarenakan faktor sumber daya aparatur desa dan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, serta faktor relasi kerjasama antara tiap lembaga dalam menjalankan program pembangunan masih kurang.

4. Royandi dkk melalui penelitiannya yang berjudul “Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut” mencoba menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Pelabuhan Ratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU (pembangkit listrik tenaga uap).

5. Shohebul Uman melalui penelitiannya yang berjudul “Relasi Kuasa dan Kesejahteraan Sosial: Telaah Kritis terhadap Eksklusi Sosial Masyarakat di Desa Bragung Guluk-Guluk Lintas Sektor”. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa di Desa Bragung berimplikasi pada terciptanya eksklusi sosial dalam tiga rezim kuasa yang menggerakkan politik lokal desa. Sampai saat ini, tidak ada aktor yang bisa menghentikan budaya dan pola politik relasi kuasa yang melahirkan eksklusi sosial ini, meskipun itu adalah seseorang kyai yang selama ini diyakini sebagai individu yang bisa menciptakan perubahan di dalam dinamika sosial karena kemampuan melalui penguasa atas ilmu agama dan spiritualitas. Bahkan Kyai, dalam penelitian ini menunjukkan keterlibatannya atas terciptanya eksklusi sosial. Temuan penting lain dalam penelitian ini adalah, tidak selamanya eksklusi sosial diciptakan oleh etnis, suku dan agama, tetapi politik juga bisa mendorong secara masif terhadap terciptanya eksklusi sosial.

Secara umum, kelima penelitian di atas mengarahkan perhatian pada relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan publik. Pada umumnya, penelitian terdahulu tentang relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat yang menonjol adalah pola relasi dominatif yaitu relasi kuasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini semakin memberi penekanan bahwa kekuasaan hanya terpusat pada

institusi pemerintahan dan tidak menyebar ke dalam diri setiap individu atau kelompok seperti yang dibayangkan oleh pemikir pasca-struktural.

Berangkat dari kekurangan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk melampaui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Artinya, penelitian ini bukan saja bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik, tetapi penelitian ini juga berupaya untuk mengungkap mekanisme pembentukan kebijakan publik demi terciptanya kebaikan bersama. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengungkap bentuk relasi yang lain antara pemerintah desa dan masyarakat yaitu relasi kemitraan.

F. Kerangka Konseptual

1. Relasi Kuasa

Relasi atau biasa disebut hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain (Jayakusuma 2001: 25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang artinya bersambung atau berangkaian yang satu dengan yang lain. Jadi, hubungan atau relasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua objek atau lebih, baik itu orang atau organisasi yang saling berhubungan dan saling berpengaruh yang akan memberikan dampak terhadap objek tersebut.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (dalam Jeanne, 2013: 66). Weber juga menghubungkan berbagai macam sumber kekuasaan karena menurutnya kekuasaan memiliki alasan atau sumber itulah sebabnya mengapa Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas dibandingkan kekuasaan. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksa orang lain bertindak sesuai kehendaknya (dalam Rafael, 2001: 190).

Weber juga mengemukakan bahwa konsep kekuasaan secara sederhana dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk membuat orang lain patuh terhadap apa yang kita kehendaki, sehingga dalam hal ini kekuasaan sangat erat kaitannya dengan politik. Menurut Santoso (2001: 95) kekuasaan dalam pengertian Max Weber merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain meskipun terdapat perlawanan atau penolakan. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi komponen utama dalam menjalankan sebuah mekanisme politik. Sedangkan kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain meskipun terdapat perlawanan atau penolakan. Dalam hal ini jelas, bahwa seseorang yang memiliki otoritas dapat dipastikan memiliki

kekuasaan, sedangkan seseorang yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki otoritas dalam dirinya.

Weber juga mengungkapkan bahwa ada tiga bentuk kekuasaan yaitu pertama kekuasaan tradisional yang bersumber dari tradisi masyarakat yang masih memegang bentuk kerajaan atau kasta, Kedua kekuasaan kharismatik yang bersumber dari pengakuan terhadap kualitas yang dimiliki oleh penguasa dan yang ketiga kekuasaan rasional-legal, kekuasaan ini berlandaskan sistem yang berlaku melalui peraturan atau perundang-undangan serta ada batasan wewenang yang dimiliki oleh pejabatnya.

Pengertian kekuasaan menurut paham Marx dan Weber yang menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi seperti kekuasaan yang dimiliki oleh Raja terhadap rakyatnya. Kekuasaan menurut paham Marx dan Weber dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus.

Mc. Iver (dalam Syarif, 2008: 11) membagi bentuk kekuasaan dalam tiga model yaitu bentuk kasta, bentuk oligarkis dan demokratis. Bentuk kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku, bentuk ini biasanya terjadi pada masyarakat yang masih

memegang sistem kasta. Bentuk oligarkis hampir serupa dengan bentuk kasta namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bentuk demokrasi lebih menekankan pada kemampuan seseorang tanpa melihat status sosial atau kasta dalam masyarakat.

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi. Kekuasaan dapat berhubungan dengan instansi, jabatan, kharisma (Weber). Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas dan kewenangan untuk bertindak. Kekuasaan dalam hal ini merujuk pada kewenangan atau hak yang diperoleh oleh aktor untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai kewenangan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa relasi kekuasaan adalah hubungan yang terjalin antara dua atau lebih orang ataupun instansi yang saling mempengaruhi dan dari hubungan tersebut dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat positif dan juga bersifat negatif atau dominasi.

2. Pemerintah Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Dalam perkembangan desa kemudian tetap dikenal dalam susunan pemerintahan di Indonesia yakni desa sebagai tingkat pemerintahan yang

paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian pengertian pemerintahan desa menurut Momon Soetusna Sendjaja Sjachran Basan (2002: 30), yaitu kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya. Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kesatuan antara kepala desa dan perangkat desa itulah yang disebut dengan pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya

cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dari pengertian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

3. Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan publik atau kebijakan pemerintah merupakan terjemahan bahasa Inggris, *public policy*, kata *policy* diartikan “kebijakan” (Wibawa, 1994: 34; Darwin, 1998: 35). Sedangkan *public* adalah “kumpulan” orang yang sama terhadap suatu isu atau masalah. Menurut Thomas R. Dye (1992: 2), “*Public policy is whatever the government choose to do or no to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan

sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Lebih lanjut, Thomas Dye (1992: 2-4) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson (1970: 35) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah). Menurut David Easton (1965: 35), “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004: 5) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-sumsi perilaku (Anggara, 2018: 36).

4. Pencegahan Covid-19

Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Lindungi diri anda dan orang lain di sekitar anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat.

Berdasarkan standar *World Health Organization* (WHO) Untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Cuci tangan anda secara rutin. Gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol.
- b. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan.
- c. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut anda.
- d. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
- e. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis.
- f. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.
- g. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengembulkannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari Covid-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat.

Dari pengertian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, setiap individu diharapkan untuk mengedepankan sikap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017: 9). Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola atau nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002: 5).

Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Sugiyono (2013: 1) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Sugiono (2017: 91) berpendapat bahwa objek penelitian dapat dinyatakan dengan “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*), yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Maka objek penelitian ini adalah relasi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *purposive* dalam menentukan narasumber *purposive* adalah teknik pengambilan atau penentuan narasumber. Narasumber (*Informan*) adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Narasumber (*Informan*) dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan narasumber (*informan*) yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun subjek penelitian berjumlah 12 (tiga belas) orang narasumber (*informan*) yang terdiri dari:

Tabel I.1 Deskripsi Narasumber (*Informan*)

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Widodo	47	Laki-laki	S1	Lurah
2	Lilik R. Purnomo	45	Laki-laki	S1	Carik
3	Budi Antoro	48	Laki-laki	SMA	Kamituwo
4	Robertus D. Sumaryanto	54	Laki-laki	S1	Tokoh masyarakat
5	Wasgiono	51	Laki-laki	D3	Tokoh masyarakat
6	Naryanto	40	Laki-laki	D3	Ketua Tim Relawan
7	Sudar	39	Laki-laki	SMA	Anggota Tim Relawan
8	Rohman	43	Laki-laki	SMP	Masyarakat
9	Supamilah	42	Perempuan	SMA	Masyarakat
10	Gunawan	38	Laki-laki	SMP	Masyarakat
11	Tugiem	55	Perempuan	SD	Masyarakat
12	Rubianti	42	Perempuan	SMP	Masyarakat

Sumber: Data lapangan di Kalurahan Gari 2022

Tabel 1.1 menunjukkan nama-nama narasumber (*informan*) yang menjadi subjek penelitian bagi peneliti. Subjek penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari pemerintah kalurahan: Lurah, Carik, Kamituwo (3 orang), serta tokoh masyarakat (2 orang), Tim Relawan Covid-19 (2 orang), dan masyarakat biasa (5 orang). Narasumber (*informan*) di atas adalah orang-orang yang ikut adil dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia misalnya dari perpustakaan atau dari tempat penelitian.

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyo 2012: 46).

b. Wawancara (*Interview*)

Sugiyono (2017: 114) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, hasilnya akan lebih kredibilitas atau dapat dipercaya jika didukung dengan sejarah pribadi, kehidupan masa kecil, disekolah, di tempat kerja, di masyarakat, atau autobiografi (Sugiyono 2017: 124-125).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2017: 131) dalam penelitian kualitatif, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data di antaranya:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2017: 135) Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan data yang disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai makna dan arti.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada penelitian yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan deskripsi

singkat dari informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi yang valid dan jelas.

BAB II
PROFIL KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang berada di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Luas Wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Gari diketahui luas wilayah Kalurahan Gari adalah 600,525 Ha.

Tabel II.1 Luas Wilayah Kalurahan Gari

No	Jenis Pengguna	Luas (Ha)
1	Jalan	50,5
2	Sawah dan ladang	119,180
3	Perkuburan	0,7500
4	Industri	0,2500
5	Pertokoan/perdagangan	0,1000
6	Perkantoran	0,5000
7	Tanah wakap	0,2000
8	Pekaragan	103,1500
9	Tanah tegalan	343,0000
10	Tanah bengkok	324,990

Sumber: Data Profil Kalurahan Gari 2021

Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa Kalurahan Gari memiliki tanah tegalan atau lahan kering yang sangat luas yakni 343,0000 Ha yang mana tanah tegalan ini lebih luas daripada bagian wilayah di Kalurahan Gari yang lainnya. Luasnya lahan tegalan atau lahan kering ini dikarenakan mayoritas penduduk Kalurahan Gari memilih untuk berkebun. Lahan perkebunan atau ladang merupakan lahan tanah kering yang cocok untuk ditanami tanaman sayur mayur dan sejenisnya, hal demikian lah yang terjadi di Kalurahan Gari. Selain tanah tegalan, tanah bengkok atau tanah garapan milik desa juga cukup luas yakni 324, 990 Ha. Luasnya lahan pertanian dari pada lahan lainnya dikarenakan mayoritas mata pencaharian dari penduduk Kalurahan Gari adalah pada sektor pertanian seperti kebun sayur, jagung, padi, kacang-kacangan, Lombok dan sebagainya.

2. Letak Wilayah

Sebelah Utara : Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar.

Sebelah Timur : Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari.

Sebelah Selatan : Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari.

Sebelah Barat : Kalurahan Gading, Kapanewon Playen.

Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kalurahan Gari berbatasan dengan beberapa wilayah, dari sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon

Ngliar. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari dan dari sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Gading, Kapanewon Playen.

B. Kondisi Demografi

Kondisi demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Kalurahan Gari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.717 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.336 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.381 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.119 yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.739 dan kepala keluarga perempuan sebanyak 380. Penduduk Kalurahan Gari tersebar di 9 padukuhan, 20 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT).

1. Data Penduduk Menurut Usia atau Umur

Usia merupakan suatu ukuran lama waktu hidup seseorang dalam satu tahun. Usia akan selalu berhubungan dengan kemampuan dan aktivitas seseorang di dalam melakukan kegiatan. Berikut akan dijelaskan jumlah penduduk menurut usia yang telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok usia.

Tabel II.2 Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk
1	0-6	239	224	463
2	7-12	296	283	579
3	13-18	292	282	574
4	19-25	307	333	640
5	26-40	693	732	1.425
6	41-55	748	745	1.493
7	36-65	348	396	744
8	56-65	229	257	486
9	>75	184	129	313
Jumlah		3.336	3.381	6.717

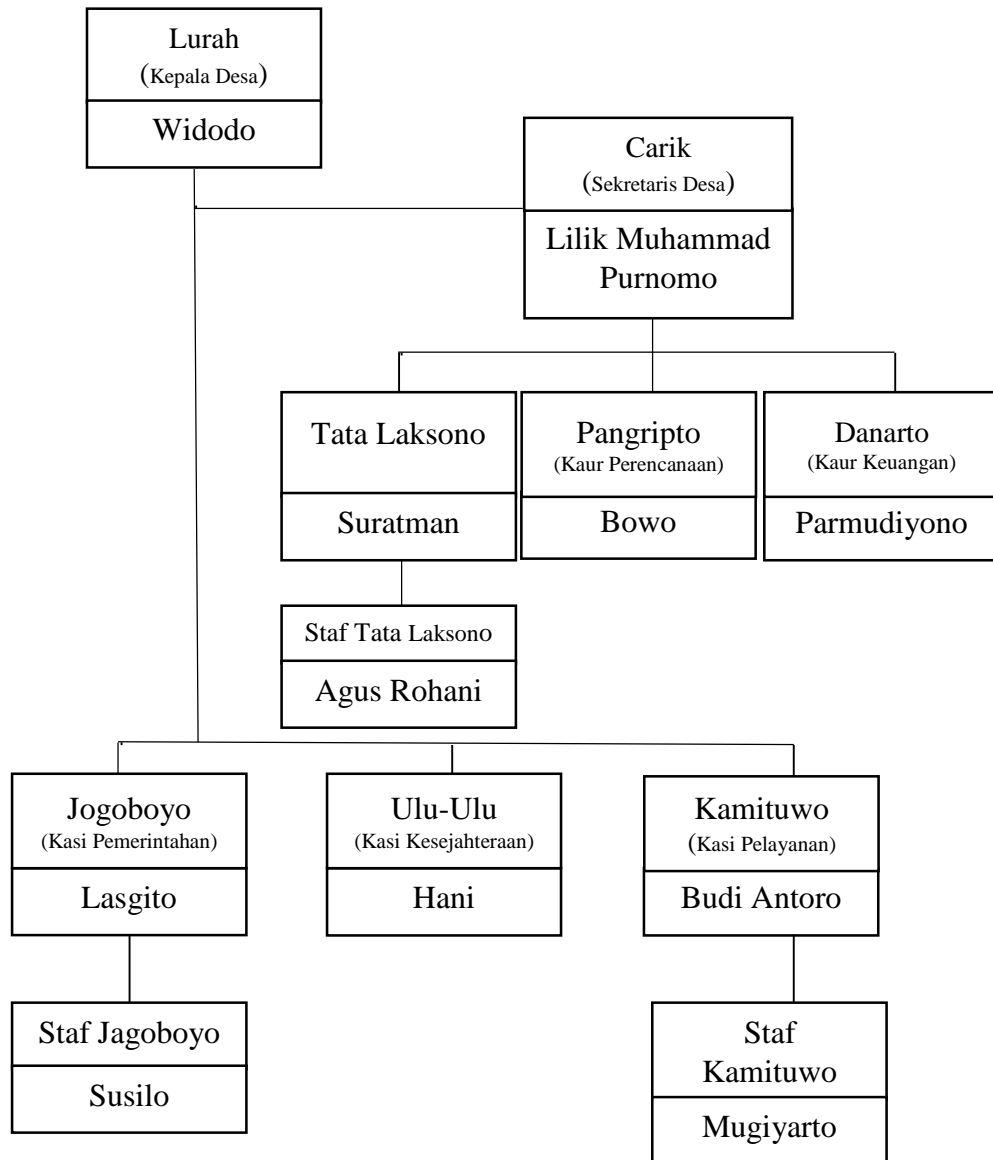
Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Kelompok usia yang mendominasi atau jumlah penduduk paling banyak adalah penduduk yang berusia 41-45 tahun yakni total keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 1.493 orang. Sedangkan penduduk usia 26-40 tahun secara keseluruhan berjumlah 1.425 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kalurahan Gari didominasi oleh penduduk usia produktif. Skala usia produktif ini menjadi modal untuk membangun serta memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Gari.

2. Lembaga Pemerintah

a. Pemerintah Kalurahan Gari

Bagan II.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Gari



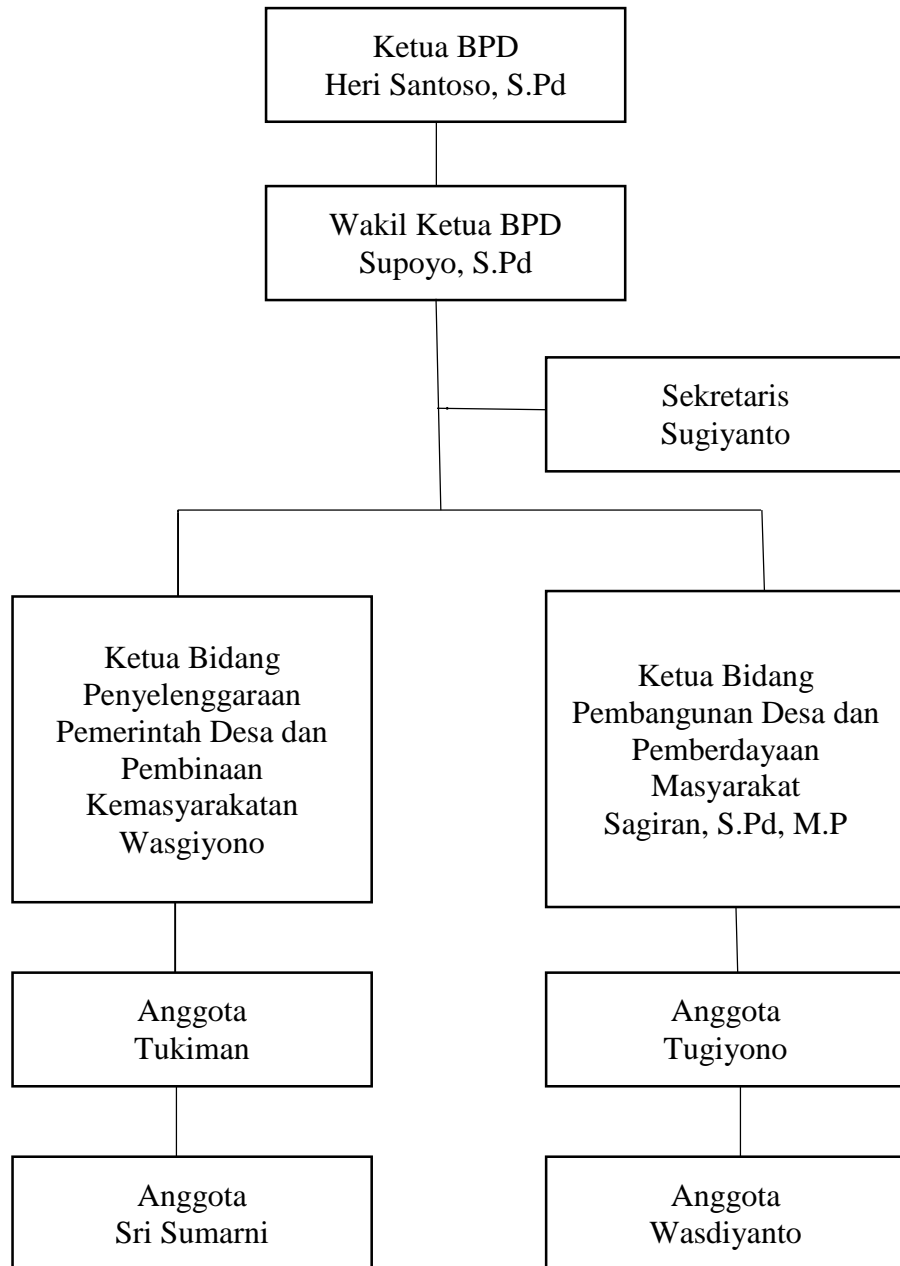
Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Bagan II.1 menunjukkan nama-nama pejabat Pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan tugas dan jabatannya masing-masing yang beranggotakan 11 orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Struktur tersebut dilampirkan sebagaimana dimaksud untuk menunjukkan nama serta jabatan dalam kursi pemerintahan Kalurahan Gari pada tahun 2021 Hingga pada masa penelitian tahun 2022.

Mengapa data ini menjadi penting untuk disampaikan pada bab ini? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi para pembaca. Data ini merujuk pada subsistem pemerintahan Kalurahan Gari dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki fungsi masing-masing. Tidak hanya itu, data ini juga merujuk pada pembentukan Satgas Covid-19 di Kalurahan Gari, yang mana setiap jabatan yang diemban memiliki tugasnya masing-masing, seperti Lurah yang berperan sebagai penanggung jawab dan sebagai ketua Satgas Covid-19 kalurahan. Orang pertama yang akan mengetahui dan menginformasikan adanya kasus di kalurahan maupun padukuhan adalah Dukuh itu sendiri yang ditemani oleh seluruh ketua RT/RW di setiap padukuhan yang ada di Kalurahan Gari.

b. Struktur BPD atau BPKal

Bagan II.2 Struktur BPD atau BPKal Kalurahan Gari



Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Bagan II.2 menunjukkan BPD atau biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi fungsi pemerintahan di tingkat desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 mempunyai fungsi dan tugas yaitu:

- 1) Fungsi BPD
 - a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- 2) Tugas BPD
 - a) Menggali aspirasi masyarakat;
 - b) Menampung aspirasi masyarakat;
 - c) Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
 - i) Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa;
 - j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;

- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m) Melaksanakan perundang-undangan.

Dalam masa pandemi sekarang ini fungsi pengawasan tentunya menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 serta relasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting.

c. Visi Misi Kalurahan Gari

1) Visi Kalurahan Gari

TERWUJUDNYA KALURAHAN GARI YANG “NYAWIJI, BASWARA ING MERCAPADA” dengan bersatu kita mampu berbicara di dunia yang lebih luas.

Dalam rangka menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi yang begitu pesat sudah saatnya kita melakukan modernisasi desa tanpa meninggalkan kultur, adat dan budaya desa.

2) Misi Kalurahan Gari

Misi Kalurahan Gari diwujudkan dalam “SAPTA KARYA”

- a) Mengoptimalkan kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Pamong Kalurahan demi

tercapainya pemerintahan yang akuntabel serta memberikan pelayanan yang mudah, aman dan nyaman bagi masyarakat;

- b) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;
- c) Meningkatkan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui internet berdesa;
- d) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga, serta memberikan ruang yang ideal bagi pemuda untuk berkarya membangun desa;
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- f) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang mendesa;
- g) Menjadikan dusun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; dan
- h) Meningkatkan PAD menuju kemandirian kalurahan.

d. Sarana dan Prasarana Kesehatan

1) Prasarana Kesehatan

Tabel II.3 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas pembantu	2
2	Posyandu	9
Jumlah		11

Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.3 menunjukkan bahwa prasarana kesehatan di Kalurahan Gari bisa dikatakan cukup untuk memadai. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan posyandu di setiap padukuhan. Selain posyandu, keberadaan puskesmas pembantu juga memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan prasarana seperti posyandu dan puskesmas merupakan hal penting dalam upaya penanganan Covid-19. Artinya, masyarakat yang terindikasi terinfeksi wabah Covid-19 bisa memperoleh pelayanan kesehatan di posyandu dan puskesmas

2) Sarana Kesehatan

Tabel II.4 Saran Kesehatan

No	Saran Kesehatan	Jumlah (Personil)
1	Dokter Gigi	1
2	Bidan	1
3	Perawat	10
Jumlah		12

Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.4 menunjukkan bahwa sarana kesehatan masih terbilang cukup dengan jumlah 1 orang dokter, 1 orang dokter gigi dan 10 perawat. Sarana kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan Covid-19. Jumlah dokter dan bidan tentu menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan edukasi tentang cara menanggulangi penyebaran Covid-19 serta tentang pentingnya menjaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan Covid-19 dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, baik melalui himbauan

edukasi serta aturan yang dibuat oleh pakar kesehatan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan demi terkendalinya situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 atau menurunkan persentase (%) penularan.

3) Lembaga Keamanan

Tabel II.5 Kelengkapan Lembaga Keamanan

No	Lembaga Keamanan	Jumlah (Personil)
1	Hansip	44
2	Satgas Linmas	1
3	Mitra Koramil/TNI	1
4	Babinsa/Polri	1
Jumlah		47

Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.5 menunjukkan bahwa keamanan di Kalurahan Gari terjamin karena setiap Padukuhan terdapat anggota Tim Satgas dan Pos Kamling/Pos penjagaan dan lain-lain. Keberadaan lembaga keamanan lengkap dengan personilnya sangat bermanfaat bagi Kalurahan Unit Siaga Bencana (USB) untuk menciptakan situasi yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Lembaga keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga ketertiban massa serta sebagai orang yang mengawasi dan mengontrol kawasan yang bersifat mengumpulkan massa atau kerumunan.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel II.6 Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum masuk TK	331
2	Sedang TK	100
3	Tidak pernah sekolah	3
4	Sedang sekolah	1.353
5	Tidak pernah sekolah	25
6	Pernah SD tapi tidak tamat	20
7	Tamat SD sederajat	1.537
8	Tidak tamat SLTP	5
9	Tidak tamat SLTA	23
10	Tamat SMP/sederajat	1.436
11	Tamat SMA/sederajat	1.611
12	Tamat D-1/sederajat	31
13	Tamat D-2/sederajat	15
14	Tamat D-3/sederajat	89
15	Tamat S-1/sederajat	129
16	Tamat S-2/sederajat	7
17	Tamat S-3/sederajat	1
18	Tamat SLB B	1
Jumlah		6.717

Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.6 di atas menunjukkan data penduduk menurut pendidikan yang ada di Kalurahan Gari. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang tamatan SMA/sederajat memiliki jumlah paling banyak. Selain tamatan SMA/sederajat, penduduk Kalurahan Gari juga sudah cukup banyak yang berpendidikan tinggi seperti lulusan S-1, S-2, bahkan sudah ada yang mendapat gelar lulusan S-3 walaupun hanya satu orang. Selain itu, penduduk yang sedang duduk di bangku pendidikan juga cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memberikan perhatian pada bidang pendidikan.

4. Lembaga Kemasyarakatan

a. PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat atau biasa disebut dengan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Anggota PKK di Kalurahan Gari berjumlah 57 anggota dengan 10 macam jenis kegiatan yaitu, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan Dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Kesehatan. Akan tetapi, tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh PKK dimana pada 2021 program yang terlaksana ada 6 program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, rencana kesehatan. Dengan kegiatan yang berbeda seperti penyuluhan tentang pola asuh anak dan narkoba, penyuluhan kebersihan lingkungan, kerja bakti, menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan kembangkan PKK, sosialisasi lewat media sosial untuk pemanfaatan pekarangan tanaman obat dalam penanganan pandemi Covid-19, sosialisasi 3M, penyuluhan tentang pola hidup sehat, meningkatkan kegiatan posbindu dan posyandu dan pembinaan PMT Bagi balita.

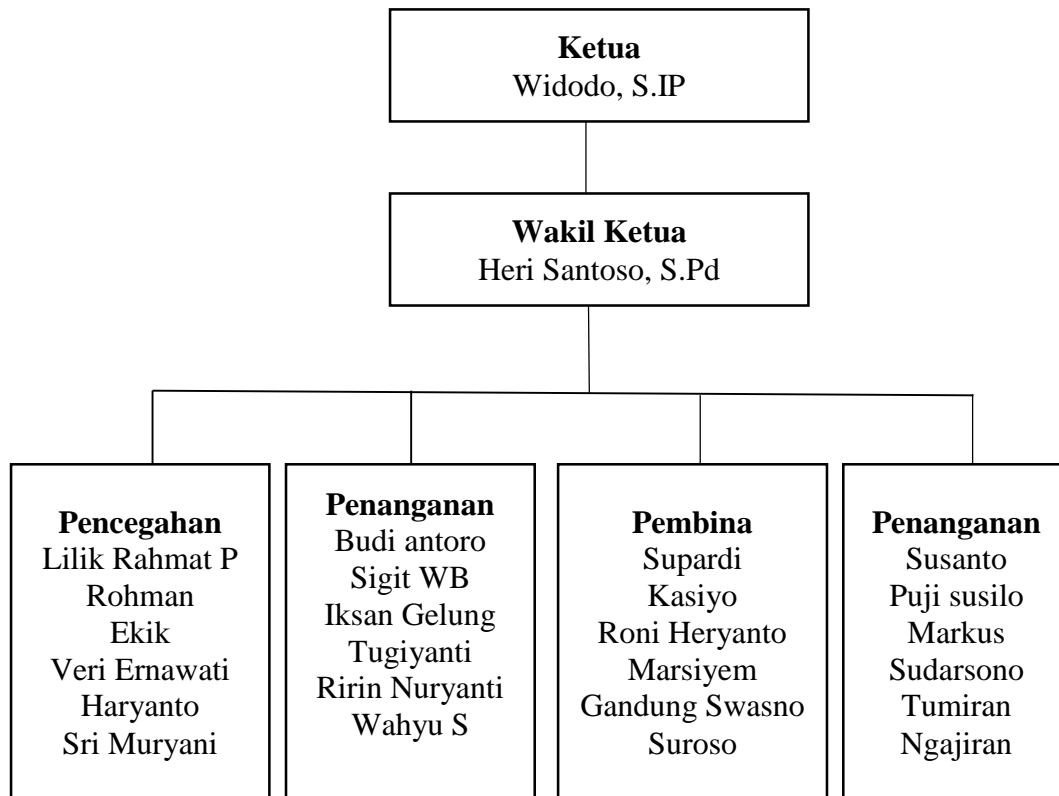
b. Karang Taruna

Karang Taruna Mekar Pandega merupakan lembaga pemuda yang ada di Kalurahan Gari. Karang Taruna mekar pandega memiliki banyak sekali kegiatan, salah satu pada masa pandemi karang taruna masuk ke dalam relawan USB (Unit Siaga Bencana) yang mana tugasnya membantu para sukarelawan dalam upaya pencegahan Covid-19 seperti, mengedukasi, penyemprotan penjagaan pos dan bantuan *logistic*.

5. Satgas Covid-19 di Kalurahan Gari

Berikut merupakan susunan dan personalia tim peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *coronavirus disease* (Covid-19) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kalurahan Gari Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko penularan Infeksi *Coronavirus Disease* (Covid-19).

**Bagan II.3 Struktur Satgas PPKM Gari Nyawiji M01
Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul**



Sumber: Data Profil Kalurahan Gari Tahun 2021

Tabel II.3 menunjukkan nama dan jabatan tim dalam satuan gugus (Satgas) Covid-19 di Kalurahan Gari yang diketuai langsung oleh Lurah serta beranggotakan seluruh Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan seluruh elemen masyarakat yang dianggap punya kapasitas dalam upaya pencegahan Covid-19. Setiap padukahan mempunyai satgas Covid-19. Nama-nama di atas menunjukkan peran besar yang diambil oleh setiap masyarakat yang terlibat dalam struktur Satgas Covid-19. Nama-nama di atas diambil berdasarkan kapasitas dalam menyampaikan serta mengedukasi masyarakat tentang Covid-19. Adapun Satgas Covid-19 terdiri dari Pemerintah Kalurahan, LPMD, Karang Taruna, PKK,

Pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pihak keamanan yang ada di Kalurahan Gari.

Penentuan Satgas Covid-19 dilakukan melalui mekanisme musyawarah kalurahan. Musyawarah kalurahan merupakan forum diskusi yang diikuti oleh BPKal, Pemerintah Kalurahan, lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal dan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan Gari. Tujuannya adalah untuk menentukan personil Satgas Covid-19.

Gambar. II.1 Rapat Pra Kondisi Pembentukan Gugus Covid-19 di Kalurahan Gari



Sumber: Dokumentasi Rapat Pra Pembentukan Tim Satgas Covid-19

Gambar II.1. Menunjukkan kegiatan dari pemerintah kalurahan bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Kalurahan Gari dalam upaya pembentukan Tim Satgas Covid-19 yang di selenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang dipimpin langsung oleh Lurah Kalurahan Gari Widodo. Sejak awal pandemi pemerintah kalurahan memiliki sikap *responsive* yang sangat baik terhadap kejadian yang sedang terjadi.

Diharapkan dengan adanya Tim Satgas Covid-19 tingkat kalurahan ini dapat membantu pemerintah kalurahan serta masyarakat dalam memberikan edukasi serta himbuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat oleh para pakar kesehatan menjadi hal yang penting dalam upaya pencegahan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, baik melalui strategi dan upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan kesehatan yang terkait berdasarkan standar WHO.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis terkait Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Otoritas merupakan hal yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan Gari karena dapat melegitimasi segala kebijakan yang akan mereka keluarkan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, otoritas yang melekat pada institusi Pemerintah Kalurahan Gari masih lemah. Pemerintah Kalurahan Gari belum menggunakan otoritasnya dengan maksimal karena tidak mampu mewujudkan kepatuhan bagi masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat dapat dilihat dari adanya pasien Covid-19 yang pada akhirnya meninggal dunia.
2. Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kalurahan Gari mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan mengurangi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi penetapan anggaran penanganan Covid-19, *lockdown* wilayah, pembuatan posko, pembentukan Satgas Covid-19, pembentukan relawan PPKM, penyaluran BLT DD, sembako, dan vitamin kepada masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid-19. Agar kebijakan tersebut diimplementasikan dengan

baik, Pemerintah Kalurahan Gari bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai elemen seperti pihak Kapanewon (Kecamatan) Wonosari, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT, RW, dan Dukuh di seluruh Kalurahan Gari. Sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Gari sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat satu kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti hajatan.

3. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Kepatuhan itu dapat tercipta karena faktor eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan regulasi yang dibuat pemerintah tentang penanganan dan pencegahan Covid-19. Sedangkan kepatuhan internal berkaitan dengan kesadaran setiap individu untuk menjalankan protokol kesehatan. Untuk menciptakan kepatuhan, pemerintah kalurahan berupaya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menjadi pihak pertama yang menjalankan kebijakan tentang penanganan dan pencegahan Covid-19. Dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, pemerintah dan masyarakat Kalurahan Gari menekankan pentingnya sikap saling percaya satu sama lain. Untuk menjaga sikap saling percaya tersebut kedua pihak saling berkomunikasi melalui perantara Satgas Covid-19. Sejauh ini, masyarakat Kalurahan Gari belum terlalu patuh terhadap

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penanganan dan pencegahan Covid-19. Ketidapatuhan itu membawa konsekuensi yaitu adanya pasien Covid-19 yang pada akhirnya meninggal dunia serta. Ketidapatuhan itu juga membuat Kalurahan Gari ditetapkan sebagai wilayah zona merah penyebaran Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran bahwa Pemerintah Kalurahan Gari hendaknya memberlakukan sanksi (misalnya, denda, kerja sosial, dan lain sebagainya) kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sanksi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- Easton, D. 1965. *A System Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Baru Negara Lama*. Pascasarjana STPM “APMD”: Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik “Proses Analisis dan Partisipasi”*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putro, Widoyoko Eko. 2012, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rieneka Cipta: Jakarta.
- Santoso, Tomas. 2001. *Kekuasaan dan Kekerasan. Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Universitas Kristen Petra: Surabaya.
- Sugiyono. 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Journal:

Agus, Mushodiq Muhamad., dan Ali, Imron. 2020. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam mitigasi pandemi COVID-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)*. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.

file:///C:/Users/Private/Downloads/15315-46089-1-PB%20(2).pdf.

Alwi, Dahlan. 2017. *Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao*. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5139/1/ALWI%20DAHLAN.pdf>.

Arif, Royandi Eva Satria., dan S, Saharuddin. 2019. *Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8 (2), 163-173. Kampus IPB Dramaga: Bogor.

<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/7430/6160>.

Dangi, Khrisna Firdaus Umbu. 2021. *Relasi Kekuasaan dalam Program Rumah Layak Huni*. Perpustakaan APMD: Yogyakarta.

http://repo.apmd.ac.id/1617/1/KHRISNA%20FIRDAUS%20UMBU%20DAN%20GL_17520032.pdf.

Dona, Fauziah., dan I, Ishak. 2017. *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Kampus Bina Widay Panam: Pekanbaru.

<https://media.neliti.com/media/publications/206320-ekonomi-politik-relasi-pemerintah-daerah.pdf>.

Kamahi, Umar. 2017. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Universitas Nusa Cendana: Kupang.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/viewFile/2926/2802>.

Manik, Jeanne Darc N. 2013. *Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Masyarakat*. Universitas Bangka Belitung: Bangka Belitung.

<https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/43>.

Mantouw, Miranda Wulandari. 2018. *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)*. Perpustakaan APMD: Yogyakarta.

<http://repo.apmd.ac.id/450/1/658-IP-IV-2018-13520026-MIRANDA%20WULANDARI%20MANTOUW.pdf>.

Moeis, Syarif. 2008. *Struktur Sosial: Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan*. Universitas Pendidikan Nasional: Bandung.

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH__3.pdf.

Ravi, Santoso., dan E, Erman. 2017. *Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016*. Kampus Bina Widya: Pekanbaru.

<https://media.neliti.com/media/publications/163298-ID-relasi-antar-kelembagaan-desa-dalam-pemb.pdf>.

Samson, Antonius. 2021. *Relasi Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Harjobinangun dalam Mencegah Penyebaran Covid-19*: Perpustakaan APMD: Yogyakarta.

http://repo.apmd.ac.id/1595/1/ANTONIUS%20SAMSON_17520316.pdf.

Umam, Shohebul., dan Haq, Muhammad Izzul. 2017. *Relasi Kuasa dan Kesejahteraan Sosial*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

<https://core.ac.uk/download/pdf/190042379.pdf>.

Peraturan Pemerintah & Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Lembar Negara Republik Indonesia No.7.

Permendagri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Berita Negara Republik Indonesia No. 2094.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembar Negara Republik Indonesia No. 245.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19). Lembar Negara Republik Indonesia No. 87.

Website:

<https://www.kemenkopmk.go.id/teladan-gotong-royong-masyarakat-di-tengah-pandemi>.

<https://www.alodokter.com/ketahui-cara-untuk-mencegah-penularan-virus-corona>

<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3221/protokol-tanggap-covid-19-ini-arahan-gus-menteri-pada-relawan-des>

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/peraturan_pemerintah_nomor_21_tahun_2020-2.pdf.

<https://adoc.pub/iii-metode-penelitian-metode-penelitian-yang-menggambarkan-d.html>

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH__3.pdf.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2020-cipta-kerja>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/14501641/survei-menunjukkan-masih-ada-yang-ngotot-mudik-lebaran-apa-alasannya>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5195776/sleman-dan-gunungkidul-jadi-zona-merah-corona-di-diy>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/13541671/survei-sebagian-besar-warga-menolak-PPKM-karena-sulit-cari-nafkah>.

<https://siwalimanews.com/desakan-tolak-perpanjangan-PPKM/>.